

GEJALA

"PIYE KABARE?"

# BASIS

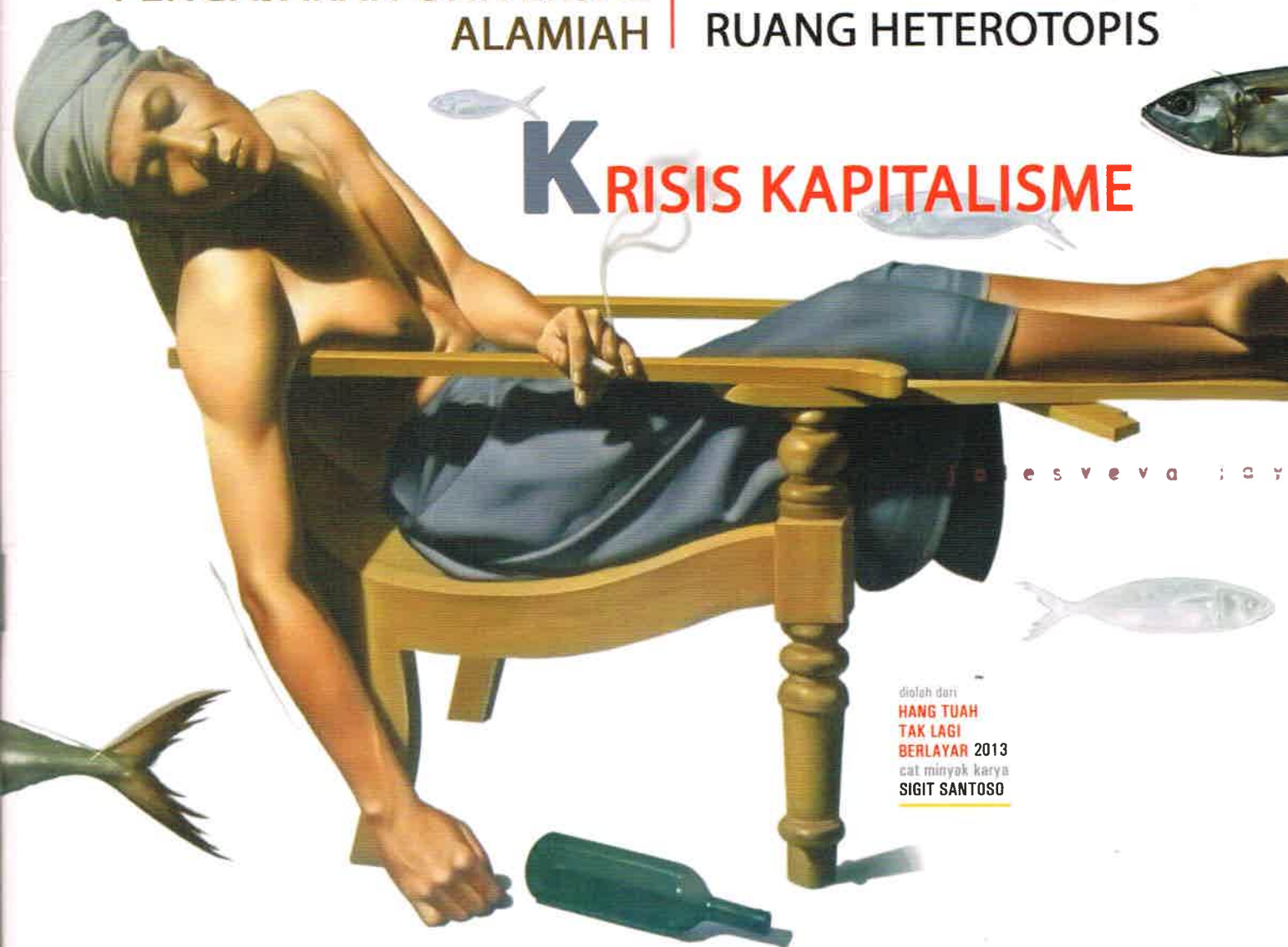
menembus fakta

## HUKUM SEBAGAI PERINTAH

**J**ACQUES RANCIERE:  
PENGAJARAN UNIVERSAL  
ALAMIAH

**P**OLITIK TERPENJARA:  
BILIK ASMARA DAN  
RUANG HETEROTOPIS

**K**RISIS KAPITALISME



diolah dari  
**HANG TUAH  
TAK LAGI  
BERLAYAR 2013**  
cat minyak karya  
**SIGIT SANTOSO**

Rp 20.000.00

DUA BULANAN, NOMOR.11 - 12, TAHUN KE-62, 2013

# BASIS

menembus fakta

SIUPP No. 213/SK/MENPEN/SIUPP/D.1/1986.

Jo Ditjen PPG

Nomor 32/Ditjen/PPG/K/1996, 27 Maret 1996

Penerbit

**Yayasan BP Basis**

Anggota SPS ISSN: 0005-6138

Penasihat

**Franz Magnis-Suseno**

**P Swantoro**

Pemimpin Redaksi

**Sindhunata**

Wakil Pemimpin Redaksi

**A. Sudiarja**

Redaktur Pelaksana

**A. Bagus Laksana**

Wakil Redaktur Pelaksana

**Purnawijayanti**

Redaksi

**A. Setyo Wibowo**

**B. Hari Juliawan**

**Heru Prakosa**

**B. Rahmanto**

Redaktur Artistik

**Hari Budiono**

**Ansila**

Kontributor

**C. Bayu Risanto, Rhoma Dwi Aria Yuliantri**

Sekretaris Redaksi

**Maria Daniar Ristanti**

Promosi/ Iklan

**Slamet Riyadi, A. Yulianto**

Administrasi/ Distribusi

**Maria Dwijayanti, Francisca Haryani,**

**Agustinus Mardiko**

Keuangan

**Filipus Bino, Ani Ratna Sari**

Alamat

Jl Pringgokusuman No. 35, Yogyakarta

Telepon: (0274) 6508836, Faks: (0274) 546811

Surel administrasi/distribusi:

basis.adisi@gmail.com

Surel redaksi: basismajalah@yahoo.com

Rekening:

BCA Sudirman Yogyakarta

No. 0370285110 a.n. Sindhunata

BRI Cik Ditiro Yogyakarta

No. 0029-01-000113-56-8 a.n. Sindhunata

TANDA TANDA ZAMAN / **Sindhunata**

Awas Gejala Diktatorisme ... 2

KACA BENGGALA / **A. Bagus Laksana**

Politik Terpenjara:

Bilik Asmara dan Ruang Heterotopis ... 4

BASIPEDIA / **B. Hari Juliawan**

Krisis Kapitalisme ... 13

BASIPEDIA / **A. Setyo Wibowo**

Asal-usul Demokrasi di Yunani (3) ... 15

BAHASA / **Agustinus Gianto**

Bahasa dan Alam Pikiran ... 18

PENDIDIKAN / **A. Setyo Wibowo**

Jacques Ranciere:

Pengajaran Universal Alamiah ... 20

FILSAFAT / **Reza A. A. Wattimena**

Dunia Baru, Masalah Baru, Metode Baru ... 29

TOKOH / **Nugroho Angkasa**

Mengenang Romo Kun ... 34

TOKOH / **Aris Setiawan**

Hajar Satoto Bergamelan Pamor ... 37

BAHASA / **Y. K. Sutrisna**

Bila Ada Aku Mengapa Ada Saya ... 40

BUKU / **Andi Andianto**

Perjuangan Samurai Legendaris ... 43

BUKU / **Budiawan Dwi Santoso**

Di Bawah Bendera Merah, Di Balik Gaz 51 ... 45

HUKUM / **A. Widyarsono**

Konsep Hukum Sebagai Perintah:

Positivisme Hukum Menurut L. A. Hart ... 48

CERPEN / **Tjahjono Widarmanto**

Mbah Cipto ... 57

PUISI ... 64 /

**Adri Sandra** - Si Bisu

**Syafrizal Sahrin** - Pesan

**Muhammad Aswar** - Marena 1960

One Stop Travel Services

**NUSA SANTANA PRIMA**  
Tour & Travel

☎ 513 873

Jl. Diponegoro 116 Yogyakarta

**Our Services:**

- \* Domestic and International Ticketing
- \* Domestic and International Hotel Reservation
- \* Outbound & Inbound Tour Package

- \* Incentive Tour
- \* Homestay Package
- \* Passport, Visa & Travel Insurance

- \* MICE Arrangement
- \* Airport Transfer & Car Rental
- \* Money Changer



# POLITIK TERPENJARA: Bilik Asmara dan Ruang Heterotopis

A . B A G U S L A K S A N A

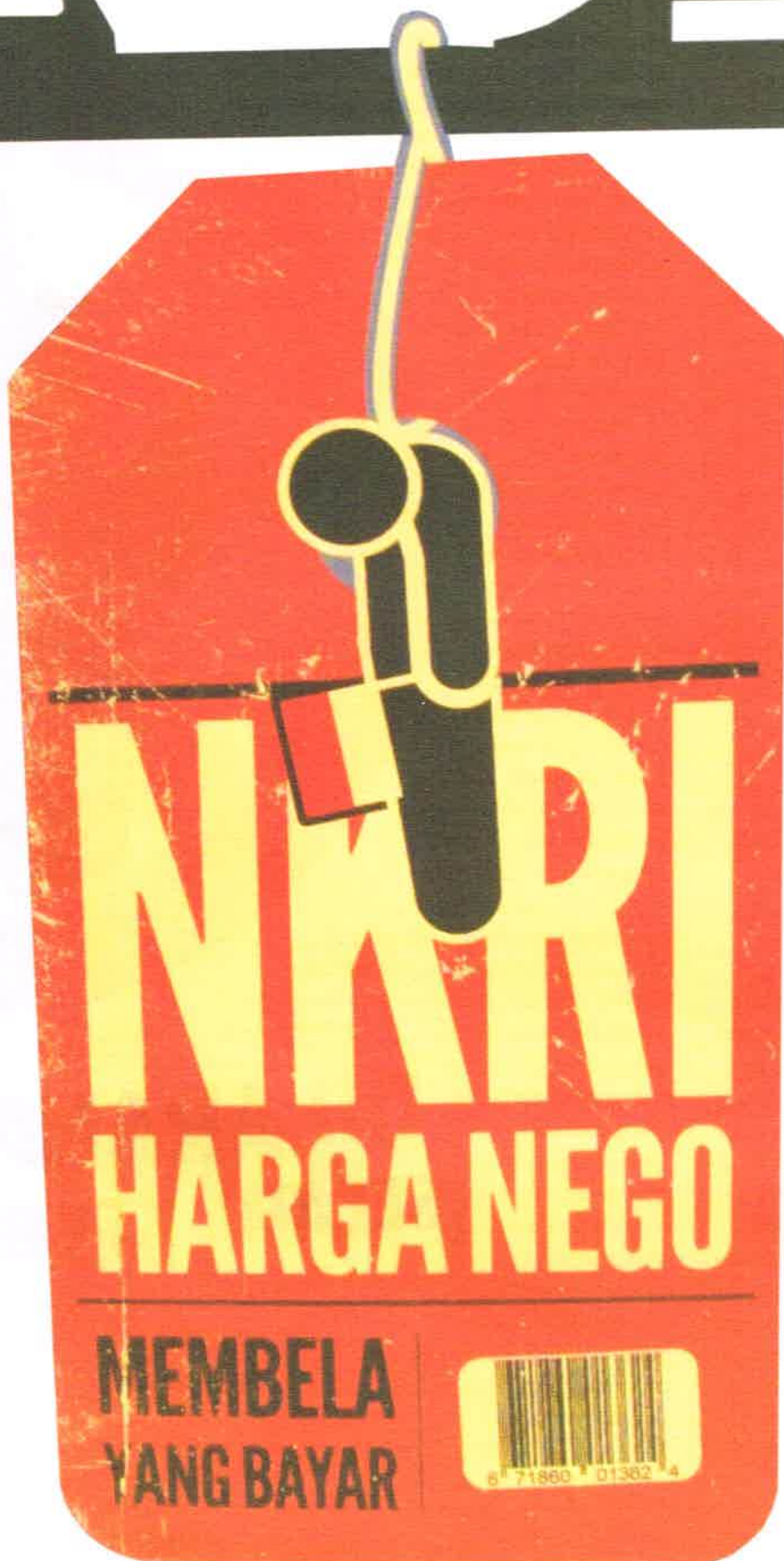
Ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar ditangkap tangan oleh KPK karena dugaan menerima suap, publik terhenyak: kredibilitas badan hukum negara ambruk! Ternyata tak hanya itu, KPK juga menemukan mariyuana dan pil ekstasi di laci kantor Akil Mochtar (*The Jakarta Post* 5/10/2013). Belum reda kasus ini, terkuak lagi kasus korupsi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

**S**eiring makin runtuhnya wibawa negara karena kasus ini, makin sesak pula penjara oleh penghuni elite. Mereka inilah yang mengubah dinamika, fungsi, dan peran penjara sejak masa Reformasi. Populasi napi elite yang secara politis punya koneksi dan secara ekonomis *tajir* meningkat. Andi Malarangeng, akhirnya ditahan, namun kasus Hambalang dan Bank Century tentunya masih akan mengirim lebih banyak lagi napi jenis ini ke penjara. Begitu juga dengan sejumlah narapidana kasus narkoba. Kadang kedua kategori ini bersatu, seperti dikhawatirkan terjadi dalam kasus Akil Mochtar itu. Tak berlebihan bila dikatakan bahwa dua kategori narapidana ini telah berperan paling besar mengubah situasi penjara kita dalam satu dekade terakhir ini,

sebuah perubahan yang amat mencolok dibandingkan dengan situasi penjara zaman Orde Baru dan zaman kolonial.

Pada sekitar akhir Ramadhan (Juli) 2013, Sefti Sanustika, penyanyi dangdut dan istri Ahmad Fathanah, seorang tersangka dalam skandal korupsi impor daging sapi yang melibatkan Kementerian Pertanian dan jajaran elite PKS, mengungkapkan harapannya akan adanya bilik asmara di penjara suaminya, rutan KPK. Seperti dilaporkan *Kompas*, ia bilang, “Kalau disiapin, senang. Kangen juga ‘kan sudah lima bulan (Fathanah ditahan).” (*Kompas* online, 11/7/2013).

Pernyataan Sefti ini tentu saja menimbulkan kontroversi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permintaan bilik asmara ini. Abraham Samad,



ketua KPK, berargumen bahwa kebebasan di rumah tahanan memang harus dibatasi. Tentu saja, wacana mengenai bilik asmara ini dipicu oleh terbukanya skandal bilik asmara yang konon bertarif Rp50 juta per hari yang disewa Freddy Budiman, gembong narkoba, untuk berkencan dengan teman perempuannya, Vanny Rossane, di Lapas Cipinang, Jakarta.

Lain dengan bilik asmara yang diminta Sefti, bilik asmara Freddy-Vanny memang istimewa, barangkali tak pernah ada presedennya dalam sejarah lembaga pemasyarakatan Indonesia. Menurut pengakuan Vanny, kamar untuk memadu asmara dan mengonsumsi narkoba itu tak lain tak bukan adalah kantor Kepala Lapas Thurman Hutapea, yang kemudian dicopot dari jabatannya akibat kasus ini. Freddy sendiri kemudian dipindahkan ke Nusakambangan.

Kasus ini telah menyadarkan publik mengenai berbagai ketidakberesan yang makin meluas dalam sistem Lapas di tanah air akhir-akhir ini. Bukan soal bilik asmara saja, Freddy Budiman ternyata masih bisa mengendalikan bisnis narkoba internasional dari kamar penjaranya. Dengan menggunakan lima telepon genggam, Freddy dengan leluasa mengatur penyelundupan 1.412.475 butir ekstasi dari Cina, selain paket 400.000 butir ekstasi dari Belanda (VivaNews online, 30/7/2013).

Terungkapnya kasus bilik asmara dan ketidakberesan sistem Lapas ini rupanya berakibat luas. Pada tanggal 18

Agustus 2013, sekelompok narapidana mengamuk di LP Labuhan Ruku, Sumatera Utara. Mereka membakar beberapa bagian penjara dan kabur. Menurut laporan *Tempo* (26 Agustus-1 September 2013), pemicunya adalah soal remisi tahanan narkoba yang konon diperketat.

Kemenkum HAM memang berusaha menerapkan PP No. 99 Tahun 2012 mengenai kebijakan remisi, yaitu pengetatan remisi untuk napi kasus narkoba sebagai tindakan responsif atas maraknya kasus narkoba dan peringan hukuman untuk napi kasus kejahatan ringan. Para napi narkoba bereaksi. Merasa tak akan mendapat remisi karena tak punya koneksi dan uang seperti Freddy, mereka pun mengamuk.

Dalam kasus LP Labuhan Ruku, amuk napi itu terjadi dengan mudah karena buruknya sistem pengamanan akibat jumlah penghuni penjara yang melebihi kapasitas. Lapas ini sesungguhnya hanya berkapasitas 251 orang, tetapi dihuni oleh 866 orang. Peristiwa ini menambah rentetan peristiwa kerusakan serupa yang terjadi di LP Petobo, Palu pada tanggal 4 April 2011, di LP Muaradua, Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 18 September 2011, di LP Idi Rayeuk, Aceh pada Februari 2012, di LP Kerobokan Bali pada tanggal 22 Februari 2012 di LP Tanjung Gusta pada tanggal 11 Juli 2013.

Yang paling baru terjadi di Pakem, Sleman Yogyakarta, pada tanggal 30 September 2013, para napi melakukan perlawanan ketika dilaksanakan razia telepon genggam di Lapas Narkotika II A (*Kedaulatan Rakyat*, 1/10/2013). Razia ini dilakukan karena para petugas curiga bahwa telepon genggam tersebut digunakan juga untuk transaksi narkoba.

### Penjara di masa Reformasi

Kejadian-kejadian di atas menunjukkan dengan agak gamblang kecenderungan baru mengenai keadaan dan fungsi penjara sebagai institusi pendisiplinan. Penjara sebetulnya adalah alat dan sarana paling kuat di mana kuasa negara menyeruak masuk ke dalam hidup pribadi warganya. Di penjara, negara bisa sungguh-sungguh memaksa warganya hidup tanpa kebebasan pribadi. Namun, dalam sistem politik modern Indonesia, penjara yang seharusnya adalah institusi penghukuman serta pendisiplinan atas tindakan-tindakan yang menyimpang telah menjadi institusi yang amat berlubang-lubang (*porous*), gampang ditembus, dan amat tidak disiplin.

Sebagian napi, yakni para napi elite, ternyata tak diharapkan mengikuti program disiplin hidup yang

berbeda dari hidup hariannya, seperti layaknya orang yang sedang “dihukum” karena pelanggaran hukum. Di dalam penjara, mereka masih bisa hidup seperti biasa, nyaman dan mewah seperti di rumahnya sendiri, bahkan mengendalikan bisnis narkoba. Begitulah, bagi para napi elite, penjara menjadi tempat yang sudah “normal,” bukan demi normalisasi kehidupan yang sedang terguncang. Sama sekali tak ada tujuan transformasi atau perubahan hidup lagi bagi para napi elite tersebut.

Dengan demikian, sebetulnya penjara sudah kehilangan fungsi pokok yang diamanatkan oleh masyarakat, yakni retribusi keadilan dan pengurangan tindakan kriminal (Useem dan Piehl 2008: 4). Selain itu, tentu saja hal ini menimbulkan kesenjangan antar napi yang secara potensial menimbulkan masalah. Selain itu, wibawa penjara sebagai institusi negara menjadi merosot di mata semua napi, baik yang elite maupun yang biasa-biasa saja. Kalau napi elite bisa bernegosiasi dengan uang dan koneksi, para napi biasa hanya bisa melawan dengan kekerasan. Penjara sungguh menjadi tempat yang kacau.



Banyak negara modern menghadapi masalah besar dengan penjara-penjara mereka. Di Amerika Serikat, jumlah napi makin membengkak sejak tahun 1970-an, sekitar 2% per tahun. Di tahun 2005 ada sekitar 1,5 juta napi, sama besarnya dengan jumlah penduduk kota Philadelphia. Kelompok yang paling riskan adalah pria kulit

hitam: satu dari tiga pria kulit hitam akan pernah masuk penjara selama hidupnya (Useem dan Piehl 2008:

2). Masalah rasial memang menjadi salah satu akar permasalahan kriminalitas di masyarakat Amerika yang kemudian juga berimbas pada dinamika penjara.

Indonesia pun mengalami ledakan penghuni penjara, tetapi bukan hanya ini masalahnya. Sekali lagi, sebetulnya sekarang ini kita disuguhi sebuah fenomena baru penjara Indonesia pasca-Reformasi. Lain dengan zaman Orde Baru, penjara tidak lagi dihuni oleh para narapidana kasus politik dan

napi kasus-kasus kriminal biasa, melainkan kasus narkoba dan korupsi. Ternyata napi kasus narkoba memiliki karakteristik berbeda. Beberapa di antara mereka tentu saja amat *tajir*, yakni mereka yang menjadi bandar dan pengedar.

Kejahatan narkoba juga bersifat lebih “cair” dalam arti tidak bisa dibekukan hanya dengan jeruji penjara. Jaringan peredaran narkoba merasuk ke mana-mana dengan mudah, tidak seperti kejahatan perampokan atau pencurian biasa yang sulit dilakukan oleh para napi selama masih di dalam penjara.

Di era Reformasi, kasus-kasus korupsi telah mengirim semakin banyak orang ke dalam penjara. Di satu sisi, hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam penegakan hukum, khususnya lewat KPK. Namun, di sisi lain, kenyataan ini juga merupakan tantangan amat berat bagi sistem penjara di tanah air kita yang ternyata tidak siap. Kekayaan, status sosial dan jaringan relasi yang dibawa oleh orang-orang terpidana korupsi ini ternyata juga menimbulkan pola baru dalam pelaksanaan penjara di Indonesia. Pelbagai privilese tetap mereka nikmati. Sekali lagi, hidup bisa normal belaka. Tak ada pengalaman transformatif apapun. Yang timbul justru kesenjangan dalam penjara sendiri. Bisa dibayangkan bila perasaan para napi biasa yang tak punya privilese apa-apa dan melihat bagaimana para napi elite ini bisa hidup enak di penjara: keluar masuk penjara dengan lebih leluasa.

Seperti telah disinggung di muka, muncul politik segregasi dan eksklusivitas dalam pengelolaan penjara di tanah air kita beberapa tahun terakhir ini. Memang segregasi alamiah selalu akan ada di dalam penjara, seperti di tempat-tempat lain juga. Akan ada kelas-kelas napi seperti dalam film *Shawshank Redemption* yang amat menarik itu. Pemerkosa, misalnya, akan ditempatkan di kelas terbawah di antara para napi sendiri. Tetapi politik segregasi yang dimaksud di sini adalah tindakan pat gulipat antara napi elit dan institusi penjara yang melibatkan uang, kekuasaan dan kepentingan pribadi/kelompok yang merugikan kepentingan umum, termasuk kepentingan napi-napi yang tidak punya *power*.

### Penjara dan Eksil di Zaman Kolonial

Untuk lebih memahami kecenderungan baru dalam sistem pelaksanaan penjara pasca-Reformasi ini, barangkali menarik untuk melihat kembali pengalaman penjara atau pengasingan (*exile*) yang dialami banyak pejuang nasional kita di zaman kolonial. Seperti dituturkan Rudolf Mrazek, Hatta menggambarkan pengalaman di penjara di Glodok, Batavia tahun 1934 sebagai sebuah pertapaan, tempat di mana jiwa dan

**NGAMEN  
RLANGSUNG!**

Poster karya ALIT

imannya diperteguh (Mrazek 1994: 120). Meskipun Syahrir, teman Hatta yang dipenjarakan juga (namun di Cipinang), tidak menggunakan kata-kata seperti pertapaan dan iman, namun baginya pengalaman di penjara adalah sebuah asketisme yang transformatif,

yang mengantarkannya pada pemahaman yang makin mendalam akan "kebenaran" yang selama ini ia perjuangkan. Ia menuturkan pengalamannya makan makanan penjara sebagai sebuah bagian nyata dari pengalaman transformatif ini. Karena begitu jeleknya



Poster karya ALIT AMBARA

kualitas makanan itu, ia tak ingat dan peduli lagi soal rasa makanan. Baginya, makan adalah sebuah kewajiban. Namun pada saat itulah jiwanya mulai terasah menikmati kenikmatan lain yang tidak bersifat inderawi di sekitar perut, yakni pengalaman-pengalaman spiritual yang lebih tinggi (Mrazek 1994: 121). Ia bahkan dibuat sadar mengenai banyak hal yang dulu ia terima begitu saja dan mulai mempertanyakan pelbagai cara pikir yang populer waktu itu, seperti rasionalisme, sebagai bagian dari fenomena kedangkalan hidup seperti halnya keadaan politik kolonial waktu itu.

Pada tahun 1935, bersama Hatta, Syahrir kemudian akan diasingkan ke Boven Digul, sebuah tempat pengasingan paling brutal dengan keadaan geografis yang susah dan penyakit malaria yang ganas. Ia berumur 25 tahun waktu itu dan tidak tahu apakah dia akan pernah bebas dari Digul.

Namun, dengan kata-kata yang menunjukkan kebesaran jiwanya, ia menulis sebelum pergi ke Digul:

“Semuanya memang gelap sekarang, tetapi ketika secercah cahaya nanti muncul, mungkin, akan terbukalah sebuah perspektif baru dan tak terbatas. Kita tidak boleh memandang dengan buta hal-hal luaran yang terjadi sementara ini. Kita harus berjuang melihat hal yang lebih besar dan mengarahkan semangat kita ke sana. Inilah yang membuat kita tenang, kuat dan yakin.”

(Mrazek 1994; 123).

Penjara memang sepi dan nestapa. Penangkapan Syahrir, Hatta dan beberapa aktivis Partai Pendidikan Nasional Indonesia (PNI) waktu itu sama sekali tak mendapatkan reaksi protes dari publik. Rakyat yang dibela oleh tokoh-tokoh itu ternyata diam. Syahrir merasa sudah dilupakan orang, tapi ia tak berkeberatan dengan ini semua. Memang, ia tetap amat nestapa karena akan berpisah jauh dengan orang-orang yang dicintainya. Ia menulis: “Kebahagiaan pribadiku telah hancur, karena aku dipisahkan dari orang-orang yang paling dekat denganku.” (Mrazek 1994: 125). Namun,

kenestapaan pribadi ini kemudian digantikan oleh sebuah perasaan terikat dekat pada bangsa yang sedang menderita dan terjajah, yakni bangsanya sendiri. Dalam sepiunya penjara, Syahrir merenung mengenai kedalaman cintanya pada bangsanya, ia tiba-tiba bisa mengerti pelbagai kesulitan dan ketegangan dalam hubungannya dengan rakyat yang ia bela selama itu. Ia menerima

sikap rakyat yang sering merepotkan dia.

Ketika Hatta dan Syahrir dibuang ke Digul, Soekarno sudah terlebih dahulu dibuang ke Ende mulai tahun 1934. Pembuangan ini menjadi momen yang amat transformatif bagi Soekarno. Hidup memang sengsara dan terisolasi di tempat itu, seperti ia akui, tetapi ia justru bertumbuh kembang sebagai pribadi. Di situlah ia untuk pertamakalinya mendalami Islam dan hidup sebagai seorang Muslim yang serius sembari membuka diri pada

pelbagai arus dan tradisi rohani lain, antara lain karena pergaulannya dengan para pastor di dekat rumahnya. Renungan-renungan religius dan filosofisnya akhirnya berbuah pada Pancasila. Ia pun mengembangkan banyak bakat terpendam, seperti menulis, sutradara dan produser drama, melukis dan menulis. Namun demikian, menurut kesaksian Inggit, isterinya yang kala itu menemaninya di Ende, Soekarno tetap harus berhadapan dengan persoalan depresi, juga menderita serangan malaria dan sakit keras, sebelum akhirnya dipindah ke Bengkulu tahun 1938 (Giebels 2001: 205).

Harus diakui bahwa pengalaman para pejuang nasionalis di pengasingan ini tidak seluruhnya nestapa. Soekarno diberi tunjangan hidup yang cukup banyak oleh Pemerintah Hindia Belanda selama di Ende, begitu juga Dr Ciptomangunkusumo dan Iwa Kusuma Sumantri di Banda Neira. Hidup di Banda Neira bagi Syahrir dan Hatta pun cukup menyenangkan, dengan alam yang amat indah. Mengenai tempat itu, Syahrir berkisah pada Maria Duchâteau, kekasihnya di Belanda: “Kadang-kadang bulan pun seperti memancarkan kehangatan. Kalau terang bulan, di luar kita bisa membaca seperti waktu siang hari” (Giebels 2001: 207). Meski ada sensor

“  
Meski ada sensor dan berbagai keterbatasan, para pejuang itu juga masih bisa membaca buku-buku. Ada hiburan intelektual di penjara atau pengasingan. Mereka pun menjalin banyak relasi pribadi dan sosial yang bermakna.”



dan berbagai keterbatasan, para pejuang itu juga masih bisa membaca buku-buku. Ada hiburan intelektual di penjara atau pengasingan. Mereka pun menjalin banyak relasi pribadi dan sosial yang bermakna. Soekarno dan Syahrir, misalnya, menjadikan rumah mereka sebagai tempat berteduh bagi banyak orang lain yang akhirnya juga menjadi anggota keluarga mereka. Syahrir dan Hatta sering bertandang ke rumah Tjipto Mangoenkoesoemo di Banda Neira. Tetapi itu semua datang bukan sebagai paket kenormalan hidup yang hendak dibawa dari hidup sebelum di pengasingan. Hiburan itu sendiri diberikan oleh pengasingan. Hatta memang tak bisa berpisah dengan buku-bukunya yang banyak itu, yang ia bawa dari Batavia, ke Digul lalu ke Banda Neira. Mengenai buku-bukunya, Hatta menulis:

“Buku-buku menjadi temanku setiap hari dan pastilah ini merupakan tempat tenang untuk belajar... Selama saya memiliki buku, saya dapat tinggal di mana saja.. Tak seorang pun menyukai penjara, tetapi meskipun jahat, penjara juga bisa menguntungkan. Ia memperkuat keyakinan kita dan membuat kita lebih pasti. Jadi, meskipun di sini, masih ada cahaya di tengah-tengah kegelapan, seperti langit malam yang diterangi oleh bintang-bintang.” (Rose 1991: 127).

Berkat buku-buku itu, tulisan-tulisan Hatta mengenai koperasi lahir di pengasingan, sedangkan Syahrir menulis topik-topik filosofis. Selama di Ende, Soekarno pun sering memesan buku-buku dari Belanda, untuk melengkapi bacaannya di perpustakaan Misi Katolik di sana. Rupanya hidup di pengasingan bagi mereka adalah hidup yang kreatif, produktif dan transformatif. Syahrir dan Hatta, misalnya, juga mengajar di sekolah dasar Banda Neira.

Unsur asmara sebagai bagian hidup pribadi juga

mewarnai perjalanan mereka selama di pengasingan. Soekarno mulai jatuh hati pada Fatmawati ketika bertemu dalam pembuangannya di Bengkulu. Syahrir juga memohon agar kekasihnya, Maria Duchâteau, boleh bergabung dengannya di Banda, sebuah permohonan yang ditolak. Namun penolakan ini justru mengantar Syahrir untuk membentuk sebuah “keluarga” baru, yakni mencintai anak-anak muridnya di Banda, termasuk Des Alwi dan dua orang anak perempuan keturunan

Arab lain (Giebels 2001: 209). Sekali lagi, pengalaman mereka ini tak seluruhnya nestapa. Ada hal-hal manusiawi normal yang mereka temukan dan nikmati. Ada juga kelemahan-kelemahan pribadi yang masih kelihatan amat gamblang. Namun amat jelas bahwa mereka memiliki sebuah keterbukaan batin atas apa yang akan menimpa mereka di penjara atau pengasingan. Mereka punya semangat dan roh untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan mereka sendiri. Batin

mereka sering terombang-ambing juga, tetapi masih kelihatan mereka mau ditarik oleh sebuah misi yang lebih luhur itu.

Sikap inilah yang membedakan mereka dari para nabi elite sekarang yang berusaha membawa seluruh paket kemewahan hidup ke dalam pengalaman penjara, sehingga menolak apa yang transformatif, yang mungkin ditawarkan oleh pengalaman penjara itu sendiri. Tak ada pula jiwa dan semangat besar untuk berjuang bagi kepentingan bangsa, meski banyak dari mereka ini adalah para “politisi” atau pejabat publik, bahkan akademisi dan intelektual. Tak ada roh perubahan itu di sana. Tak keluar pula pemikiran-pemikiran brilian. Mungkin karena mereka tak membawa “buku-buku” seperti yang dilakukan Hatta, tetapi maunya membawa uang dan narkoba. Hanya Andi Malarangeng saja yang masuk penjara KPK dengan membawa buku. Tapi kita

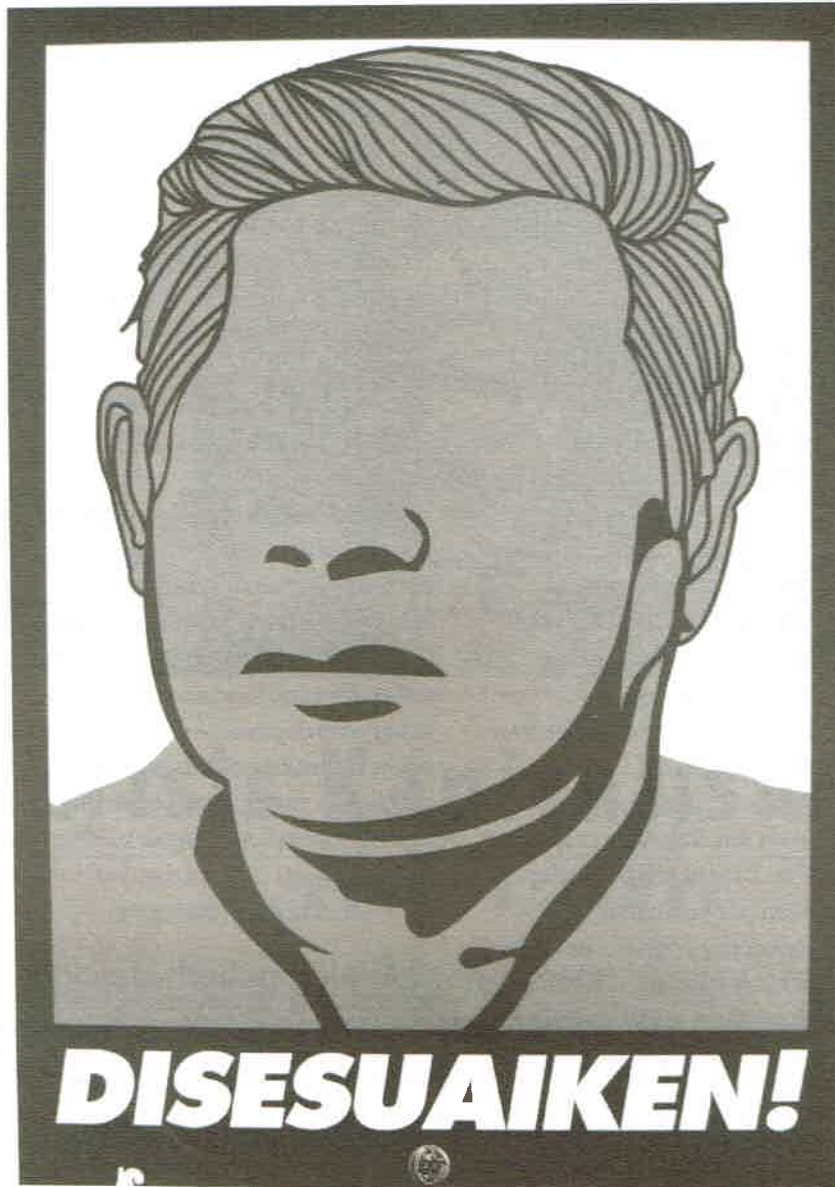
“  
**Tak ada jiwa dan semangat besar untuk  
 berjuang bagi kepentingan bangsa,  
 meski banyak dari mereka ini adalah para  
 “politisi” atau pejabat publik, bahkan  
 akademisi dan intelektual. Tak ada roh  
 perubahan. Tak keluar pula pemikiran-  
 pemikiran brilian. Mungkin karena mereka  
 tak membawa “buku-buku” seperti yang  
 dilakukan Hatta, tetapi maunya membawa  
 uang dan narkoba.**  
 ”

tiba-tiba sadar bahwa mereka ini memang sejak sebelum dipenjara tidak memiliki jiwa seperti itu. Mereka masuk ke penjara justru karena tiadanya jiwa ini, yang kemudian menjerumuskan mereka pada pelbagai

tindakan koruptif. Yang ada adalah agenda untuk memperkaya diri atau melanggengkan kekuasaan. Dalam arti tertentu, para nabi politisi dan pejabat publik itu tidak sedang berpura-pura peduli pada nasib bangsa yang telah mereka tipu. Memang mereka begitu dari sono-nya.

Memilukan juga bahwa keterbukaan politik dan kemakmuran di era pasca-Reformasi telah menghancurkan kaum intelektual pula. Di zaman Orde Baru para intelektual menjadi nabi

dan aktivis, dan berada dalam pinggiran politik. Tak jarang mereka dipenjarakan atau diasingkan (Bagus Laksana 1997: 20-27). Sekarang ini jajaran intelektual juga masuk bui karena tergoda uang dan jabatan. Sekali lagi, tak ada roh perjuangan. Pusat hidup mereka bukan lagi “buku,” alias cara berpikir, pengetahuan dan kebijaksanaan. Mereka masuk dalam lingkaran uang, kuasa dan politik.



### Penjara dan Politik Heterotopis

Penjara dan pengasingan seharusnya memang bukanlah tempat yang biasa. Meminjam istilah Michel Foucault, penjara dan pengasingan adalah *heterotopia*,

yakni tempat-tempat yang tak lazim dan berada di luar ruang hidup keseharian orang ramai, *a kind of places that are outside all places, even though they are actually localizable* (Foucault 1967:17). Tempat-tempat heterotopis adalah “tempat-tempat liyan,” ruang-ruang yang mendapatkan makna yang terpecah-pecah dan sering tak bersesuaian satu sama lain. Ruang-ruang ini menginterupsi kontinuitas dan normalitas ruang hidup sehari-hari. Dalam ruang-ruang ini, aspek “keliyanan” atau perbedaan didesakkan pada hidup sehari-hari yang rutin. Dengan demikian, banyak tempat sebenarnya bisa menjadi

“heterotopis” kalau dibandingkan atau dalam hubungan dengan tempat-tempat lain. Kevin Hetherington (1997: viii) mendefinisikan heterotopia sebagai sistem yang mengatur sebagian hidup sosial dengan cara yang berbeda dengan lingkungan sekitarnya. Akibatnya, di tempat-tempat heterotopis ini menjadi tempat yang unik dan “liyan” dan menawarkan sebuah cara berbeda untuk melakukan sesuatu. Maka, sebuah perumahan atau

apartemen yang terisolasi dari lingkungannya dengan pengamanan superketat adalah tempat heterotopis. Begitu juga tempat-tempat pembuangan sampah di pinggiran kota, atau tempat-tempat kumuh. Begitu juga barak-barak penampungan para buruh yang membangun kota-kota megapolitan seperti Dubai, atau kompleks pekuburan di kota Kinshasa yang dijadikan tempat hidup dan interaksi kaum miskin urban dengan gaya hidup mereka yang tak mengikuti aturan yang lazim (Dehaene dan de Cauter 2008: 297ff). Sekali lagi, semua tempat bisa menjadi heterotopis, karena pengertian heterotopia memang didasarkan pada “fungsi” sebuah tempat dalam hubungannya dengan lingkungan sekitarnya (Foucault 1967: 21).

Menurut Foucault (1967: 18), dalam masyarakat primitif selalu ada ruang heterotopis yang disediakan untuk orang-orang yang sedang mengalami “krisis” alamiah, seperti wanita yang sedang menstruasi atau hamil, orang-orang lanjut usia dan sebagainya. Dalam pengamatan Foucault, ruang heterotopis model (*heterotopias of crisis*) ini telah diganti di masyarakat modern dengan tempat-tempat heterotopis untuk mengatasi pelbagai penyimpangan (*heterotopias of deviation*), yakni ruang-ruang untuk menempatkan orang-orang dengan perilaku menyimpang atau melanggar. Dalam hal ini, penjara dan rumah sakit jiwa adalah contoh yang paling gamblang.

Dalam perspektif heterotopia deviasi ini, barangkali kita bisa melihat pelbagai gejala dan kejadian aneh yang menimpa penjara-penjara kita. Di satu pihak, penjara kita mesti berfungsi sebagai tempat pembenahan pelbagai penyimpangan (*heterotopia of deviance*), tetapi yang terjadi adalah bahwa penjara menjadi tempat hidup yang “normal”, karena penyimpangan itu tidak dianggap penyimpangan lagi. Ada normalitas yang dicari di sana, yang sebetulnya tidak “normal”. Bahkan lebih parah lagi, fungsi penjara seakan-akan dinegosiasi dari heterotopia deviasi menuju “*heterotopia of illusions*” di mana tidak hanya hal-hal yang normal yang dicari dalam penjara, melainkan juga pemenuhan hal-hal tertentu yang tidak bisa terjadi dalam hidup harian biasa, yakni praktik dan pengalaman berlebihan atau eksek (Dehaene dan De Cauter 2008: 317). Bukankah pengalaman pesta narkoba dan seks di kamar berharga 50 juta sehari sebuah eksek?

Perubahan ini terjadi karena politik juga makin menjadi arena yang heterotopis (yang menyimpang) karena telah dikendalikan bukan oleh perjuangan

demi kepentingan dan kesejahteraan umum (*bonum commune*), melainkan oleh “*other interests*” yang amat koruptif. Penjara kita menjadi seperti sekarang ini karena telah menjadi bagian dari rentetan praktik-praktik menyimpang yang makin meluas sehingga menjadi tampak “normal”. Tempat-tempat biasa yang sebetulnya tidak heterotopis, bahkan tempat yang amat publik, seperti parkiran bandara, kafe, toilet di gedung DPR, ruang sidang Mahkamah Konstitusi, dan sebagainya menjadi “heterotopis” dalam arti menjadi tempat “rahasia” karena dipakai sebagai tempat transaksi koruptif yang tersembunyi. Fungsi tempat-tempat itu kemudian dipisahkan atau diinterupsi dari rutinitasnya, meski hanya sekejap. Foucault menyebut tempat pelacuran (*brothels*) sebagai contoh heterotopia ini. Tempat-tempat koruptif di atas barangkali tak terlalu berbeda dengan tempat pelacuran, persis karena sifat “rahasia” dari pelbagai “pelanggaran” yang terjadi di dalamnya.

Semua ini menunjukkan adanya politik yang tak jalan, politik yang menyimpang, amburadul, dan heterotopis. Sebab sesungguhnya panggung politik kita bukanlah tempat dan momen yang demokratis dan publik, seperti sidang DPR, Pemilu, Pilkada dan sebagainya, melainkan ruang-ruang “heterotopis”, yakni pertemuan-pertemuan dan negosiasi rahasia di mana transaksi politik yang sebenarnya terjadi. Sejauh politik kita masih heterotopis dan menyimpang, kita pun akan menyaksikan banyak institusi dan ruang (*space*) negara seperti penjara menjadi tempat heterotopis yang menyimpang dari tujuannya.

#### RUJUKAN

- Michel Foucault, “Of Other Spaces,” (1967) dalam Michiel Dehaene dan Lieven De Cauter, eds., *Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society*, New York: Routledge, 2008.
- Lambert Giebels, *Soekarno: Biografi 1901-1950*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Bagus Laksana, “Intelektual Indonesia di Pinggiran Politik,” *Basis* No. 09-10/46 (1997), 20-27.
- Mavis Rose, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta: Gramedia, 1991.
- Bert Useem dan Anne Morrison Piehl, *Prison State: The Challenge of Mass Incarceration*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Rudolf Mrázek, *Sjahir: Politics and Exile in Indonesia*, Ithaca: Cornell Southeast Asia Program, 1994.